

BAB IV KESIMPULAN

Setelah elaborasi dan analisis yang panjang, bab ini menyimpulkan jawaban atas pertanyaan, “Bagaimana relawan politik dalam kontestasi Presidensial Tahun 2014 sampai Tahun 2019 berkembang menjadi kekuatan politik baru? dan Bagaimana implikasi keberadaan relawan politik sebagai kekuatan politik baru dalam konteks disinsentif politik kepartaian? Hal yang paling mendasar yang menyebabkan adanya transformasi dalam tubuh gerakan relawan adalah diakomodirnya beberapa tokoh kunci selaku aktivis relawan kedalam jejaring kekuasaan dibawah pemerintahan Jokowi.

Kegiatan kesukarelawanan dalam konteks politik elektoral sejatinya sangat mudah tergelincir kedalam kepentingan pragmatis telah dibahas pada bab awal penelitian ini, fakta yang terungkap bahwa agenda relawan politik dalam gerakan kesukarelawanan hanya berhenti pada aktivitas relawan politik sebelum dan pada saat kontestasi presidensial, aktivitas relawan politik sesudah kontestasi presidensial dan dalam masa pemerintahan Jokowi hanya menjadikan relawan politik sebagai alat elit politik untuk mencapai kepentingannya. Transformasi gerakan relawan politik sebagai alat elit politik menyebabkan gerakan relawan politik bertransformasi dari *voluntarism participation to mobilized participation*. Pergeseran ini memunculkan gagasan lain dalam kajian voluntarisme di Indonesia.

Penelitian ini mengakui bahwa nilai-nilai kesukarelawanan tidak sepenuhnya hilang dalam konteks gerakan relawan politik termasuk Pro-Jo sebagai kelompok relawan terbesar Jokowi. Fenomena relawan politik termasuk Pro-Jo kiranya mampu dijadikan sebuah contoh bahwa dalam memandang dan memosisikan voluntarisme politik tidak sama halnya dengan voluntarisme dibidang sosial. Kegiatan sukarela menjadi bias dan sulit dipisahkan. Oleh karena itu, penelitian ini menyuguhkan sebuah gagasan lain tentang voluntarisme. Penelitian ini menggambarkan bagaimana sisi lain dari kegiatan kesukarelawanan dalam dunia elektoral, yang secara keseluruhan tidak bergerak atas wujud partisipasi yang otonom dengan didasarkan pada pengakuan kedaulatan sebagai warga Negara.

4.1 Lunturnya Nilai Voluntaristik dalam Agenda Relawan Politik

Kasus relawan politik pada kontestasi Presidensial Tahun 2014 sampai Tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat dua cara yang sangat bertolak belakang dalam memaknai kesukarelawanan, yakni disatu sisi massa yang tergabung dalam relawan politik menganggap gerakan mereka adalah wujud partisipasi sukarela yang otonom berdasarkan panggilan jiwa dan bentuk tanggung jawab moral sebagai warga Negara yang peduli akan masa depan bangsa. Sementara dari sisi elit politik berpandangan bahwa, relawan politik adalah bagian dari *mobilized participation* dalam kepanjangan elit politik untuk kepentingan elektoral semata.

Kehadiran gerakan relawan politik dijadikan ajang manifestasi palsu *civil society* yang mendambakan partisipasi aktif. Bahkan partisipasi aktif yang semula bersifat otonom telah dibelokkan oleh para elit politik menjadi aktivitas politik pragmatis. Secara tidak sadar loyalitas para relawan terhadap kegiatan kesukarelawan dikaburkan. Kasus relawan politik pada kontestasi Presidensial Tahun 2014 sampai Tahun 2019 mempertontonkan bagaimana sulitnya menjaga marwah nilai-nilai voluntaristik manakala kepentingan elit politik telah menyusup kedalamnya.

Implikasi berkembangnya relawan politik sebagai kekuatan politik baru menunjukkan relawan politik menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam arena politik elektoral. Keberadaan relawan politik dewasa ini harus diakui menjadi salah satu mesin partisipasi politik warga Negara yang memiliki tugas dan fungsi layaknya Partai Politik. Jaringan relawan politik yang terbentuk secara informal dan bentuknya yang dinamis justru menjadikan organ relawan politik menjadi komoditas yang sulit memiliki definisi baku dalam pelabelannya.

Area kerja relawan politik dalam arena politik elektoral khususnya dalam kontestasi Presidensial yang cenderung tumpang tindih dengan Partai Politik memunculkan persoalan utamanya ketiadaan aturan yang mengikat relawan politik. Keberadaan relawan politik yang menjalankan tugas dan fungsi Partai Politik memberikan dampak disinsentif bagi politik kepartaian. Partai Politik sebagai salah satu pilar sistem demokrasi perwakilan dan menjadi prasyarat bekerjanya demokrasi selalu berupaya semakin terlembaga. Namun, relawan

politik terus menjadi mesin politik yang bergerak fleksibel untuk mendapatkan ceruk kekuasaan yang menyebabkan elit politik menggunakan relawan politik sebagai cara non-parlemen untuk menjual klaim kepada pemenang pertarungan elektoral tanpa bertarung pada saluran politik elektoral yang resmi layaknya Partai Politik.

Keterhubungan yang semakin masif antara relawan politik dengan kepentingan elit politik memosisikan relawan dalam keadaan yang sulit untuk mencapai bentuk idealnya. Ketika aktivis semu mengisi pos-pos strategis struktural relawan politik maka untuk menjaga eksistensi dan makna nilai-nilai kesukarelawanan tetap berjalan penuh dan tidak dibajak oleh elit politik hingga bebas dari kepentingan pragmatis elit politik menjadi sulit dicapai. Kemandirian organisasi relawan politik menjadi faktor kunci dalam menegakkan makna kesukarelawanan.

Pendefinisian gerakan relawan politik akan menjadi jelas bilamana relawan politik menunjukkan marwah yang berbeda dengan menanggalkan kepentingan pragmatis elit politik dan fokus pada kepentingan partisipasi politik yang bersumber pada pengakuan kedaulatan hak politik warga Negara dalam dunia politik elektoral yang semakin pragmatis.

Relawan politik sebagai kelompok kepentingan tidak sepenuhnya bekerja. Sehingga perlu perluasan definisi relawan politik yang merujuk pada tujuan dan kedudukan relawan politik. Studi-studi akademik dan elaboratif perlu dimasifkan dalam memotret kajian relawan politik, yang tidak hanya bercerita tentang

bagaimana relawan politik bergerak memenangkan calon kandidat. Namun lebih lanjut, studi komprehensif perlu dilakukan untuk melihat keterhubungan relawan politik dengan elit politik yang menyebabkan pergeseran tujuan dan kedudukan relawan politik.

Penelitian ini tidak bermaksud mendeskreditkan relawan politik, tidak pula bermaksud meragukan nilai-nilai voluntaristik yang dibawa oleh relawan politik. Namun, kasus relawan politik pada kontestasi Presidensial Tahun 2014 sampai Tahun 2019 dapat menjadi pelajaran bahwa istilah “tidak ada makan siang gratis dalam politik” nampaknya tetap berlaku dalam kegiatan kesukarelawanan politik.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya :

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif mengenai relawan politik saat Jokowi berkuasa dan pasca Jokowi berkuasa. Ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang relawan politik.
2. Studi-studi akademik perlu dimasifkan dalam memotret kajian voluntarisme, perlu dijelaskan secara jelas antara gerakan yang berbasis voluntaristik atau gerakan yang dibentuk dan dijalankan berdasarkan kebutuhan dan instruksi elit politik.

3. Perluasan definisi relawan politik yang merujuk pada tujuan dan kedudukan relawan politik perlu dilakukan karena relawan politik sebagai kelompok kepentingan tidak sepenuhnya bekerja.
4. Tugas dan fungsi relawan politik yang cenderung tumpang tindih dengan Partai Politik memunculkan persoalan dimasa depan, peraturan yang mengikat relawan politik menjadi perlu untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah.